

Membangun Transparansi: Pengawasan Pembangunan Fisik di Desa Sumberlele

Supriyanto¹, Imam Sucahyo², Andhi Nur Rahmadi³, Rizca Yurike Putri⁴, Renny Candradewi Puspitarini⁵, Novita Wulandari⁶, Nevy Rusmarina Dewi⁷, Riesta Ayu Oktarina⁸, Ratna Ayu Pawestri Kusuma Dewi⁹, Umi Qodarsasi¹⁰, Siti Musrifah¹¹, Tety Rachmawati¹², Nuril Hidayati¹³

^{1,2,3,5}Administrasi Publik, Universitas Panca Marga,

⁶Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang,

⁴Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,

⁸STIKOSA Surabaya,

⁹Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura,

¹⁰Pemikiran Politik Islam, IAIN Kudus,

¹¹Ilmu Politik, Universitas Ronggolawe Tuban,

¹²Universitas Negeri Lampung,

¹³Bahasa Inggris, Universitas Panca Marga

Article history:

Received June 3, 2025

Revised June 10, 2025

Accepted July 16, 2025

Kata kunci:

Pengawasan Partisipatif;
Pembangunan Fisik Desa;
Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
Transparansi;
Akuntabilitas

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik secara partisipatif dan mandiri. Latar belakang kegiatan dilandasi oleh pentingnya pembangunan infrastruktur desa dalam mendukung kesejahteraan, diiringi tantangan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Desa Sumberlele, sebagai bagian dari dinamika ini, memerlukan peran aktif masyarakat untuk memastikan kualitas dan efektivitas proyek-proyek fisik. Metode pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahap utama. Tahap persiapan dan koordinasi awal meliputi survei kebutuhan, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta pembentukan Tim Inti Pengawasan Masyarakat (Pokja Pengawasan). Tahap peningkatan kapasitas dilakukan melalui lokakarya dan pelatihan teknis, membekali peserta dengan pemahaman regulasi pembangunan desa, kemampuan membaca dokumen teknis seperti RAB, serta keterampilan pengawasan dan pelaporan efektif. Selanjutnya, tahap implementasi melibatkan pendampingan langsung di lapangan, diskusi temuan, dan fasilitasi dialog dengan pemerintah desa untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Meskipun kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan partisipasi, beberapa kelemahan dan batasan teridentifikasi. Ini mencakup keterbatasan waktu dan sumber daya tim pengabdian, variasi tingkat pemahaman dan komitmen anggota masyarakat, serta tantangan dalam menjembatani kesenjangan informasi dengan pemerintah desa. Keberlanjutan program pasca-pengabdian juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan mencakup perpanjangan durasi pendampingan, pengembangan modul pelatihan berjenjang, advokasi transparansi informasi, serta penguatan mekanisme kelembagaan pengawasan yang permanen di tingkat desa. Dengan perbaikan ini, diharapkan terbentuk budaya pengawasan yang berkelanjutan, mendukung pembangunan Desa Sumberlele yang lebih berkualitas dan akuntabel.

ABSTRACT

Keywords:

Participatory Supervision;
Village Physical Development;
Community Capacity Building;
Transparency;

This community service program aimed to enhance the capacity of the community in Sumberlele Village, Kraksaan District, to conduct participatory physical development oversight independently. The initiative's background stems from the crucial role of village infrastructure in supporting well-being, coupled with challenges in accountability and transparency in village fund management. Sumberlele Village, experiencing these dynamics, requires active community involvement to ensure the quality and effectiveness of its physical projects. The program's methodology comprised four main



Accountability;

stages. The initial preparation and coordination phase included a needs assessment survey, coordination with the village government and community leaders, and the formation of a Community Oversight Core Team (Pokja Pengawasan). The capacity-building phase involved workshops and technical training, equipping participants with an understanding of village development regulations, the ability to interpret technical documents like the Cost Estimate (RAB), and effective oversight and reporting skills. Subsequently, the implementation phase entailed direct field assistance, discussion of findings, and facilitation of dialogue with the village government to follow up on oversight results. While the program successfully fostered awareness and participation, several weaknesses and limitations were identified. These included the constraints of time and resources for the service team, varying levels of understanding and commitment among community members, and challenges in bridging information gaps with the village government. The sustainability of the program post-service was also a concern. Therefore, recommendations for improvement include extending the duration of assistance, developing tiered training modules, advocating for information transparency, and strengthening permanent institutional oversight mechanisms at the village level. These improvements are expected to foster a sustainable oversight culture, supporting higher quality and more accountable development in Sumberlele Village.

Corresponding Author:

Renny Candradewi Puspitarini
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga
Email: renny.candradewi@upm.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah perdesaan (1). Akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan yang layak, jembatan yang kokoh, sarana air bersih yang memadai, serta bangunan publik yang representatif, adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas layanan publik, dan penguatan kohesi sosial. Di Indonesia, semangat otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan fisik (2). Alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah pusat merupakan bentuk komitmen negara untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran, menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Namun, seiring dengan peningkatan kewenangan dan anggaran, muncul pula tantangan terkait efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat, potensi penyimpangan, inefisiensi, atau bahkan kegagalan pembangunan bisa saja terjadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri (3).

Desa Sumberlele, yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tidak luput dari dinamika pembangunan desa ini (4,5). Sebagai salah satu desa di wilayah

pesisir utara Probolinggo, Sumberlele memiliki potensi yang beragam, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun potensi pariwisata lokal. Pembangunan fisik di Desa Sumberlele, seperti pembangunan jalan desa, drainase, fasilitas umum, atau balai pertemuan, memegang peranan krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman (6,7). Setiap proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan di Sumberlele diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam konteks pembangunan yang kerap kali kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kontraktor, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat, muncul kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif (8–10). Kualitas pekerjaan yang kurang optimal, material yang tidak sesuai spesifikasi, atau keterlambatan pengerjaan adalah beberapa isu yang seringkali menjadi sorotan dalam proyek pembangunan fisik di berbagai daerah (11), termasuk potensi di Desa Sumberlele. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan serius, dana pembangunan yang seharusnya menjadi stimulus kemajuan justru akan terbuang sia-sia, dan harapan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang lebih baik akan pupus.

Dalam praktiknya, berbagai literatur dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kualitas dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur di tingkat desa adalah minimnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat (4). Keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman teknis, atau bahkan apatisme masyarakat terhadap proses pembangunan seringkali membuat desa tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan standar. Padahal, sebagai subjek dan objek pembangunan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan fisik bukanlah semata-mata bentuk kecurigaan, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata dan optimal bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, membangun kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif menjadi sangat penting dan merupakan kebijakan yang mendesak. Paradigma pembangunan daerah yang seperti ini disebut dengan pembangunan daerah berbasis masyarakat (4).

Pengawasan partisipatif dalam pembangunan fisik di desa adalah sebuah keniscayaan. Ini bukan hanya tentang mendeteksi penyimpangan, tetapi juga tentang memastikan transparansi proses, mendorong akuntabilitas pelaksana, dan pada akhirnya, membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat (12). Ketika masyarakat terlibat dalam pengawasan, masyarakat tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga aktor yang turut bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa mereka sendiri (13). Mekanisme ini juga menjadi jembatan komunikasi yang efektif, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, atau bahkan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sebelum menjadi lebih besar. Di tengah era keterbukaan informasi dan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peran pengawasan dari luar sistem birokrasi, khususnya dari masyarakat sipil, menjadi semakin relevan (14). Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip demokrasi lokal yang menuntut adanya *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik (15).

Inilah yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengawasan pembangunan fisik di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan. Kegiatan ini berangkat dari asumsi bahwa dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses informasi yang memadai, masyarakat akan mampu berperan sebagai agen pengawas yang efektif dan atau akademisi dilibatkan secara aktif. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Sumberlele dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik secara mandiri dan partisipatif. Ini mencakup pemahaman tentang dokumen perencanaan proyek (RAB, gambar teknis), standar kualitas material, jadwal pengerjaan, serta mekanisme pelaporan jika terjadi ketidaksesuaian. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya menerima hasil pembangunan, melainkan menjadi bagian integral dari proses yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar dan harapan. Disamping itu keterlibatan akademisi disini sebagai katalisator agar pemerintahan yang kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat semakin menguat. Ini juga dapat mendorong peningkatan literasi pembangunan desa lebih baik.

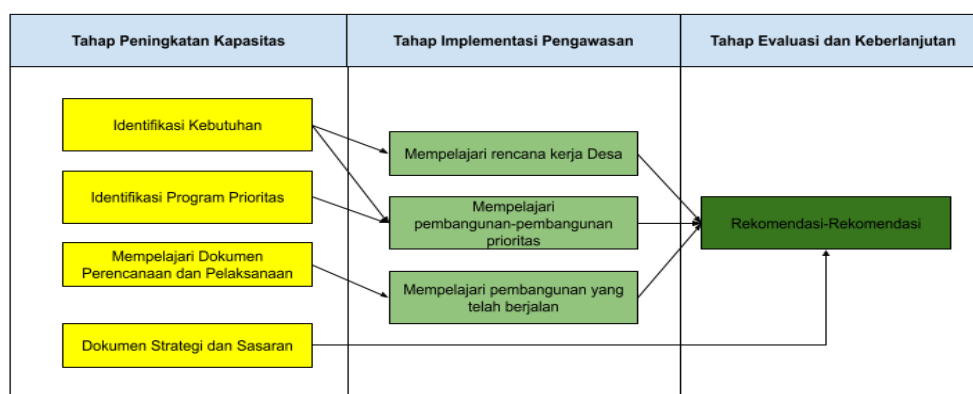
Fokus pengawasan dalam kegiatan ini adalah pada proyek-proyek pembangunan fisik yang strategis dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan jalan desa, pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan masyarakat, pembangunan drainase, atau renovasi fasilitas umum lainnya (16). Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proyek-proyek tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga dan seringkali menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan jika tidak diawasi dengan cermat. Dengan adanya pengawasan yang terorganisir dan terkoordinasi, diharapkan kualitas infrastruktur yang dibangun akan lebih baik, masa pakainya lebih lama, dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh warga Sumberlele. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di desa, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dapat terbangun dan terpelihara.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Desa Sumberlele. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan fisik akan menjadi indikator keberhasilan yang penting guna mendukung visi misi pimpinan daerah (17). Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, peningkatan kualitas dan akuntabilitas proyek pembangunan fisik, di mana setiap rupiah anggaran desa akan digunakan secara efektif dan efisien, menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai standar. Kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena proses pembangunan akan berlangsung secara lebih transparan dan partisipatif. Ketiga, terciptanya budaya pengawasan mandiri dan partisipatif di kalangan masyarakat, menjadikan mereka lebih berdaya dan proaktif dalam mengawal pembangunan di desa mereka. Dan keempat, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, di mana

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi praktik yang melekat dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Pada akhirnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan tidak hanya meninggalkan jejak berupa infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga meninggalkan warisan berupa masyarakat yang berdaya, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depan desanya sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun fondasi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat untuk pengawasan pembangunan fisik di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan, memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen pengawas yang mandiri. Proses ini dimulai dengan Tahap Persiapan dan Koordinasi Awal yang esensial. Pada tahap ini, survei awal dan identifikasi kebutuhan dilakukan di Desa Sumberlele. Ini mencakup observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur, mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas atau yang memerlukan perhatian khusus, serta memahami alur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang sudah berjalan. Informasi ini menjadi dasar untuk membangun strategi yang tepat sasaran. Selanjutnya, koordinasi intensif dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi langkah krusial. Pertemuan awal diadakan dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, serta para tokoh kunci di masyarakat untuk menjelaskan tujuan kegiatan, menjalin kerja sama, dan mendapatkan dukungan formal. Diskusi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perwakilan masyarakat yang memiliki dedikasi dan minat untuk terlibat aktif. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, kami memfasilitasi pembentukan Tim Inti Pengawasan Masyarakat (Pokja Pengawasan) yang beranggotakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, memastikan adanya keberagaman perspektif dan partisipasi yang inklusif.



Sumber : Author, 2025

Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Setelah fondasi terbentuk, kegiatan berlanjut ke Tahap Peningkatan Kapasitas, yang

menjadi inti dari proses pemberdayaan. Tahap ini diawali dengan lokakarya "Mengenal Pembangunan Desa dan Hak Masyarakat". Di sini, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang regulasi pembangunan desa, seperti Undang-Undang Desa, pentingnya transparansi anggaran desa, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga dalam mengawal setiap proses pembangunan. Sesi ini juga mengenalkan dokumen-dokumen penting seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes, melalui diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan konteks desa (12).

Selanjutnya, pelatihan teknis "Memahami Spesifikasi Proyek Fisik" dilaksanakan untuk membekali Pokja Pengawasan dengan keterampilan praktis. Mereka diajarkan cara membaca dan menafsirkan dokumen teknis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis, memahami jenis serta kualitas material bangunan, dan mengenali standar pekerjaan yang baik. Melalui penjelasan visual dan simulasi sederhana, pemahaman teknis mereka ditingkatkan agar mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan di lapangan. Pelatihan ini dilanjutkan dengan materi "Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Efektif", di mana peserta dilatih tentang etika pengawasan, teknik observasi di lapangan, cara mendokumentasikan temuan secara akurat (melalui foto, video, dan catatan), serta menyusun laporan yang jelas dan faktual. Mereka juga diajarkan jalur komunikasi yang tepat untuk menyampaikan hasil pengawasan kepada pemerintah desa atau BPD secara konstruktif dan solutif.

Tahap Implementasi, yaitu pengawasan lapangan sesungguhnya, menjadi wujud dari pelatihan yang telah diberikan. Tim pengabdian masyarakat secara aktif melakukan pendampingan lapangan berkelanjutan bersama Pokja Pengawasan. Kunjungan rutin ke lokasi proyek pembangunan fisik dilakukan untuk mengamati langsung progres pekerjaan, membandingkan realisasi dengan rencana, serta mendokumentasikan setiap temuan, baik yang sesuai maupun yang berpotensi menyimpang. Setelah setiap kunjungan, diadakan diskusi temuan dan analisis masalah bersama Pokja Pengawasan. Forum ini berfungsi sebagai ruang untuk mengevaluasi data yang terkumpul, menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi atau langkah tindak lanjut yang perlu diambil. Jika ditemukan isu yang memerlukan perhatian serius, tim pengabdian akan memfasilitasi audiensi atau dialog dengan pemerintah desa. Tujuan dari fasilitasi ini adalah untuk menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, di mana temuan pengawasan masyarakat dapat disampaikan langsung kepada pihak berwenang, mendorong dialog konstruktif, dan mencari solusi bersama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan dan standar.

Terakhir, kegiatan diakhiri dengan Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan, yang bertujuan untuk mengukur dampak dan merencanakan keberlanjutan program secara mandiri oleh masyarakat. Kami menyelenggarakan evaluasi partisipatif bersama seluruh pihak terlibat untuk mengukur efektivitas metode yang telah diterapkan, mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan pengawasan. Berdasarkan evaluasi ini, kami mendorong Pokja Pengawasan, bersama pemerintah desa dan BPD, untuk menyusun pedoman atau SOP pengawasan desa yang sederhana. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan baku bagi masyarakat di masa depan, sehingga praktik pengawasan partisipatif dapat terus berlanjut secara terlembaga. Selain itu, kami juga

mendorong pembentukan jaringan pengawas desa, di mana Pokja Pengawasan Desa Sumberlele dapat terhubung dengan kelompok pengawas serupa di desa lain atau dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki visi serupa. Melalui jaringan ini, diharapkan terjadi pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas berkelanjutan, dan penguatan ekosistem pengawasan di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun sistem dan semangat pengawasan yang akan terus hidup dan bermanfaat bagi kemajuan Desa Sumberlele. Seluruh kegiatan ini dirangkum dalam *Sumber : Author, 2025*

Gambar 1.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengawasan pembangunan fisik partisipatif di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, merupakan respons konkret terhadap urgensi peningkatan kualitas tata kelola pembangunan di tingkat desa. Dengan alokasi dana desa yang semakin besar, efektivitas dan akuntabilitas menjadi krusial. Pembahasan ini akan mengulas secara mendalam bagaimana metode yang telah dirancang diimplementasikan, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta dampak yang diharapkan dan yang telah terlihat dari inisiatif ini. Analisis juga akan mencakup refleksi terhadap peran keterlibatan masyarakat dan potensi keberlanjutan program.

1. Implementasi Tahap Persiapan dan Koordinasi Awal

Tahap persiapan merupakan fondasi krusial yang menentukan arah dan keberhasilan kegiatan. Dalam konteks Desa Sumberlele, survei awal dan identifikasi kebutuhan dilakukan dengan pendekatan yang holistik. Tim pengabdian tidak hanya mengamati infrastruktur fisik yang ada, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga untuk memahami persepsi mereka terhadap pembangunan selama ini. Dari observasi lapangan, teridentifikasi bahwa meskipun pembangunan fisik terus berjalan, informasi mengenai detail proyek seringkali cukup transparan di tingkat akar rumput. Papan informasi proyek kadang lengkap atau mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memverifikasi kesesuaian antara rencana dan realisasi. Beberapa warga juga menyampaikan tentang kualitas material atau jadwal pengerjaan yang sesuai. Data awal ini memperkuat keyakinan akan kebutuhan bahwa sudah terdapat pengawasan yang lebih partisipatif. Masyarakat sering diajak untuk berkomunikasi pada setiap kegiatan yang mana nantinya terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan fisik di Desa Sumberlele. Beberapa contoh kegiatan partisipatif dapat dicermati pada gambar





Sumber : Penulis, 2025

Gambar 2. Implementasi Kegiatan Pembentukan dan Pendirian yang Mengundang Masyarakat

Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat berlangsung secara intensif. Pertemuan dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan LPM menjadi agenda prioritas. Pentingnya membangun kemitraan dan mendapatkan restu formal dari pemerintah desa tidak bisa dilepaskan, karena mereka adalah pemegang kebijakan dan pelaksana pembangunan di tingkat lokal. Dalam diskusi ini, tim pengabdian memaparkan visi kegiatan yang bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat tata kelola yang baik dan memastikan pembangunan tepat sasaran. Pendekatan ini berhasil mereduksi potensi resistensi dan justru mendapatkan dukungan. Tokoh masyarakat, yang memiliki pengaruh besar di Desa Sumberlele, juga dilibatkan sejak awal untuk menjembatani komunikasi dengan warga dan membangun kepercayaan. Mereka membantu mengidentifikasi individu-individu yang berpotensi menjadi anggota Tim Inti Pengawasan Masyarakat (Pokja Pengawasan), dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan gender, usia, profesi, dan wilayah domisili untuk memastikan inklusivitas. Terbentuknya Pokja Pengawasan ini merupakan langkah konkret pertama dalam mengorganisir kekuatan masyarakat untuk tujuan bersama.

Pelaksanaan Tahap Peningkatan Kapasitas

Tahap ini merupakan jantung dari upaya pemberdayaan masyarakat, di mana transfer pengetahuan dan keterampilan menjadi fokus utama. Lokakarya "Mengenal Pembangunan Desa dan Hak Masyarakat" dirancang dengan pendekatan yang sangat interaktif, menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan konteks Desa Sumberlele. Materi tentang Undang-Undang Desa dan pentingnya transparansi anggaran desa disajikan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui diskusi kasus nyata. Peserta diajak untuk memahami bahwa dana desa adalah hak mereka dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan membuka wawasan mereka tentang posisi strategis yang mereka miliki sebagai pemangku kepentingan utama. Sesi ini berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa dan memicu pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta, yang sebelumnya

mungkin enggan bersuara.

Materi pelatihan teknis "Memahami Spesifikasi Proyek Fisik" menjadi tantangan tersendiri mengingat latar belakang peserta yang beragam. Untuk mengatasi ini, tim pengabdian menggunakan alat peraga visual seperti contoh gambar teknis sederhana, sampel material bangunan, dan alat ukur dasar. Mereka diajarkan cara membaca RAB secara sederhana, mengidentifikasi jenis material yang benar, dan melakukan observasi awal terhadap kualitas pekerjaan, misalnya dengan melihat campuran semen, kerapian pasangan bata, atau dimensi jalan. Meskipun tidak menjadikan mereka ahli teknis, pelatihan ini memberikan bekal dasar yang cukup untuk mengidentifikasi anomali atau ketidaksesuaian yang jelas. Contohnya, jika RAB menyatakan penggunaan semen merek tertentu tetapi di lapangan terlihat merek lain dengan kualitas yang diragukan, atau jika dimensi jalan yang dibangun terlihat lebih sempit dari yang tertera pada gambar. Fokus pelatihan adalah pada poin-poin krusial yang paling sering menjadi sumber masalah.

Puncak dari peningkatan kapasitas adalah pelatihan "Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Efektif". Sesi ini bukan hanya tentang bagaimana mengamati, tetapi juga bagaimana mengomunikasikan hasil observasi secara efektif dan bertanggung jawab. Peserta dilatih untuk mendokumentasikan temuan dengan foto yang jelas (berserta tanggal dan lokasi), membuat catatan singkat namun informatif, dan menyusun laporan dengan struktur yang mudah dipahami. Etika pengawasan ditekankan, yaitu pengawasan dilakukan dengan niat baik untuk perbaikan, bukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan. Simulasi penyampaian laporan kepada pemerintah desa dan BPD juga dilakukan, mengajarkan peserta tentang pentingnya komunikasi yang sopan, santun, namun tegas. Ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dan memaksimalkan peluang perbaikan. Pelatihan ini juga menggarisbawahi bahwa laporan yang baik harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.

Dinamika Tahap Implementasi (Pengawasan Lapangan)

Tahap implementasi merupakan arena pembuktian dari semua pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan. Pendampingan lapangan berkelanjutan oleh tim pengabdian menjadi kunci keberhasilan di tahap ini. Dalam kunjungan ke lokasi proyek seperti pembangunan jalan atau saluran drainase, anggota Pokja Pengawasan didampingi untuk secara langsung mempraktikkan keterampilan observasi mereka. Mereka belajar cara mengukur lebar jalan, kedalaman drainase, atau bahkan menghitung jumlah sak semen yang digunakan per meter persegi. Pendampingan ini bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka. Anggota Pokja mulai berani bertanya kepada pekerja proyek tentang spesifikasi atau kemajuan pekerjaan.

Setelah observasi lapangan, sesi diskusi temuan dan analisis masalah menjadi wadah penting untuk memproses informasi. Dalam diskusi ini, temuan-temuan di lapangan dibahas secara kritis: apakah ada perbedaan antara rencana dan realisasi? Mengapa perbedaan itu terjadi? Apa dampaknya terhadap kualitas atau masa pakai infrastruktur? Dari diskusi ini, Pokja Pengawasan mulai belajar bagaimana mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya gejala. Misalnya, jika kualitas cor beton diragukan, apakah itu karena campuran material yang salah, kurangnya pengawasan di lapangan, atau faktor lain? Diskusi ini juga menjadi ajang untuk

merumuskan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan realistis.

Aspek krusial berikutnya adalah fasilitasi audiensi/dialog dengan pemerintah desa. Ketika ada temuan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengabdian memfasilitasi pertemuan antara Pokja Pengawasan dengan Kepala Desa dan perangkat terkait, atau BPD. Dalam pertemuan ini, Pokja Pengawasan mempresentasikan hasil pengawasan mereka dengan data dan bukti yang telah dikumpulkan. Pentingnya dialog terbuka ditekankan untuk menciptakan suasana musyawarah mufakat, bukan konfrontasi. Beberapa temuan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan di lapangan, sementara yang lain mungkin memerlukan pembahasan lebih lanjut. Respons dari pemerintah desa bervariasi; ada yang sangat kooperatif, namun ada pula yang membutuhkan pendekatan persuasif lebih lanjut. Namun, kehadiran tim pengabdian sebagai fasilitator netral seringkali membantu mencairkan suasana dan mendorong respons positif. Keberhasilan dalam memfasilitasi dialog ini menjadi indikator penting bahwa pengawasan partisipatif dapat menjadi mekanisme kontrol yang sehat dalam tata kelola desa.

Refleksi dan Analisis Dampak Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa adalah hasil yang paling nyata. Sebelum kegiatan, banyak warga mungkin merasa pembangunan adalah sepenuhnya urusan pemerintah desa. Kini, mereka memahami bahwa mereka adalah bagian integral dari proses tersebut. Kemampuan teknis dasar yang diperoleh Pokja Pengawasan memungkinkan mereka untuk berbicara dengan data dan fakta, bukan hanya asumsi atau gosip.

Dampak selanjutnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik. Dengan adanya mata dan telinga dari masyarakat yang terlatih, para pelaksana proyek (baik pemerintah desa maupun kontraktor) cenderung lebih berhati-hati dan patuh pada spesifikasi. Kehadiran Pokja Pengawasan di lokasi proyek seringkali menjadi deterrent bagi potensi penyimpangan. Ini terlihat dari beberapa proyek yang menunjukkan peningkatan kualitas pekerjaan atau ketepatan waktu setelah adanya pengawasan aktif dari masyarakat. Dialog yang difasilitasi juga membuka ruang bagi penyelesaian masalah di tingkat lokal sebelum menjadi isu yang lebih besar.

Lebih dari sekadar pengawasan proyek, kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan kepercayaan antar warga dengan pemerintah desa. Ketika masyarakat merasa didengar dan melihat temuan mereka ditindaklanjuti, kepercayaan terhadap lembaga desa akan meningkat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan partisipatif di masa depan, di mana masyarakat merasa lebih berdaya dan bukan sekadar objek pembangunan. Potensi konflik dapat diminimalisir melalui mekanisme dialog dan penyelesaian masalah secara musyawarah.

Kelemahan, Batasan, dan Agenda Perbaikan

Meskipun dampak positif terlihat jelas, refleksi mendalam juga mengungkap kelemahan dan batasan yang perlu menjadi pelajaran berharga untuk kegiatan selanjutnya. Keterbatasan waktu dan sumber daya adalah kendala klasik dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Durasi kegiatan yang relatif singkat tidak memungkinkan pendampingan yang intensif dan

berkelanjutan sepanjang siklus hidup proyek yang kompleks. Anggota Pokja Pengawasan membutuhkan bimbingan yang konsisten, terutama untuk proyek jangka panjang. Sumber daya yang terbatas juga membatasi jangkauan pengawasan dan mungkin menghambat penyediaan alat bantu yang lebih canggih (misalnya, alat ukur presisi).

Variasi tingkat pemahaman dan komitmen di antara anggota Pokja Pengawasan juga menjadi tantangan. Beberapa anggota mungkin sangat antusias dan cepat menyerap materi, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Konsistensi kehadiran dan partisipasi mereka juga dipengaruhi oleh kesibukan personal, yang merupakan hal wajar bagi relawan masyarakat. Ini menuntut pendekatan yang lebih personal dan fleksibel dari tim pengabdian.

Tantangan dalam menjembatani kesenjangan informasi dan komunikasi dengan pemerintah desa, meskipun telah ada upaya koordinasi, tetap menjadi poin penting. Tidak semua perangkat desa mungkin memiliki tingkat keterbukaan yang sama. Terkadang, akses terhadap dokumen detail seperti RAB yang sangat teknis atau laporan keuangan yang rumit masih menjadi kendala bagi masyarakat awam. Inilah yang menghambat proses verifikasi yang lebih mendalam. Potensi resistensi pasif atau respons yang lambat dari pihak desa juga bisa mengurangi efektivitas pengawasan.

Terakhir, dan mungkin yang paling krusial, adalah isu keberlanjutan pasca-kegiatan pengabdian. Ketika tim pengabdian menarik diri, ada risiko bahwa semangat dan sistem pengawasan yang telah dibangun akan meredup jika tidak ada kerangka kelembagaan yang kuat dan dukungan internal yang berkelanjutan. Tanpa adanya legalitas formal (misalnya melalui Peraturan Desa) atau alokasi anggaran yang jelas untuk operasional Pokja Pengawasan, inisiatif ini bisa menjadi sekadar "proyek" yang berhenti ketika dukungan eksternal berakhir.

Berangkat dari kelemahan dan batasan ini, agenda perbaikan untuk kegiatan di masa mendatang menjadi sangat jelas. Perpanjangan durasi dan intensitas pendampingan adalah hal mendesak, mungkin dengan skema mentoring jangka panjang atau pembentukan kader lokal yang terlatih untuk menjadi fasilitator internal. Modul pelatihan harus lebih berjenjang dan responsif terhadap kebutuhan spesifik, mungkin dengan spesialisasi pada jenis proyek tertentu atau penguatan aspek hukum pembangunan desa. Lebih jauh, advokasi untuk transparansi informasi perlu ditingkatkan, bahkan dengan membantu desa membangun sistem informasi publik yang mudah diakses warga (misalnya, dashboard digital sederhana). Paling penting, kegiatan selanjutnya harus secara aktif membantu pemerintah desa dalam memformulasikan mekanisme kelembagaan pengawasan yang permanen, seperti Peraturan Desa tentang pengawasan pembangunan partisipatif, yang mencakup mandat, tugas, fungsi, serta sumber daya operasional Pokja Pengawasan. Ini akan memastikan bahwa pengawasan bukan lagi inisiatif ad-hoc, melainkan bagian integral dari tata kelola Desa Sumberlele.

Kesimpulan Pembahasan

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini di Desa Sumberlele telah berhasil menanamkan benih kesadaran dan kapasitas pengawasan pembangunan partisipatif di kalangan masyarakat. Dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan sosial sudah terlihat. Namun, untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas maksimal, diperlukan perbaikan strategis yang mengatasi keterbatasan waktu, variasi kapasitas, tantangan

komunikasi, dan isu kelembagaan. Dengan perbaikan ini, visi mewujudkan pembangunan desa yang benar-benar berkualitas, efisien, dan partisipatif dapat terwujud, menjadikan Desa Sumberlele sebagai model desa yang berdaya dan transparan dalam mengelola masa depannya. Inisiatif ini menegaskan bahwa pembangunan yang ideal bukan hanya tentang fisik yang berdiri kokoh, tetapi juga tentang masyarakat yang berdaya dan mampu mengawal setiap prosesnya.

Tabel 1. Rincian Pembangunan Fisik yang dilakukan di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

No.	Pembangunan yang telah Berjalan
1	Ruang Terbuka Hijau untuk Rest Area
2	Pembangunan Drainase
3	Pembangunan Tempat Parkir Umum Kegiatan Warga
4	BUMDES Warung Kopi
5	Pembangunan Saluran Irigasi
6	Pembangunan Toilet Umum

Sumber : Data Primer dan Data Sekunder Kantor Desa Sumberlele, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo



Gambar 3. Musyawarah yang melibatkan Partisipasi Masyarakat secara Swadaya (kiri). Pembangunan fisik Rest Area di Desa Sumber Lele (Tengah dan Kanan)



Proses pengecoran



Proses pengecoran



Proses pemasangan kawat penyangga untuk pengecoran



Proses penutupan pengecoran sampai mengering



Proses Pembersihan Gorong-Gorong Saluran Air



Proses Pembersihan Gorong-Gorong Saluran Air

Gambar 4. Obyek Pembangunan Fisik yang diawasi dan dievaluasi



Gambar 5. Obyek Pembangunan Fisik yang diawasi dan dievaluasi; Pembangunan Saluran Irigasi Sawah



Gambar 6. Pembangunan Toilet Umum untuk Kegiatan Masyarakat

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengawasan pembangunan fisik partisipatif di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, telah menunjukkan signifikansi dalam mendorong kesadaran dan peran aktif masyarakat. Melalui serangkaian tahapan mulai dari koordinasi awal, peningkatan kapasitas, implementasi lapangan, hingga evaluasi, upaya untuk memberdayakan masyarakat sebagai agen pengawas telah berjalan. Partisipasi masyarakat dalam memahami dokumen perencanaan, mengidentifikasi potensi masalah, dan menyalurkan aspirasi telah menjadi indikator positif dari keberhasilan awal kegiatan ini. Namun demikian, sebagai sebuah inisiatif pengabdian yang berlandaskan pada pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan, penting untuk secara jujur mengakui kelemahan dan batasan yang ada, sehingga dapat menjadi pijakan untuk perbaikan di kegiatan mendatang.

Kelemahan dan Batasan Kegiatan

Pertama, salah satu kelemahan utama yang mungkin muncul adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh tim pengabdian masyarakat. Durasi kegiatan pengabdian seringkali terbatas pada periode tertentu (misalnya, satu semester atau beberapa minggu), yang mungkin tidak cukup untuk membangun kapasitas masyarakat secara mendalam dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dinamika proyek pembangunan yang bisa berlangsung lama. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan, alat bantu pengawasan, maupun jumlah personel pendamping, juga dapat membatasi jangkauan dan intensitas pendampingan yang bisa diberikan. Hal ini berimplikasi pada cakupan proyek yang dapat diawasi dan frekuensi interaksi dengan Pokja Pengawasan.

Kedua, adanya variasi tingkat pemahaman dan komitmen di antara anggota Pokja Pengawasan adalah batasan alami. Meskipun telah dilakukan seleksi, tidak semua anggota mungkin memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang sama dalam memahami aspek teknis pembangunan. Ini menuntut pendekatan yang sangat adaptif dalam pelatihan, namun dalam waktu terbatas, tidak semua kesenjangan pemahaman dapat tertutup sepenuhnya. Selain itu, tingkat komitmen dan waktu luang yang bisa dialokasikan oleh anggota masyarakat untuk kegiatan pengawasan juga bervariasi, mengingat mereka memiliki aktivitas dan tanggung jawab pribadi. Hal ini bisa memengaruhi konsistensi partisipasi dan efektivitas pengawasan di lapangan.

Ketiga, tantangan dalam menjembatani kesenjangan informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa masih menjadi batasan. Meskipun kegiatan ini berupaya memfasilitasi dialog, tidak menutup kemungkinan adanya resistensi atau kurangnya respons cepat dari pihak-pihak tertentu di pemerintahan desa terhadap laporan atau rekomendasi dari masyarakat. Keterbukaan informasi terkait detail proyek, seperti RAB yang transparan dan mudah diakses, masih menjadi pekerjaan rumah di banyak desa. Jika data kunci tidak mudah didapatkan, upaya pengawasan akan terhambat, bahkan jika masyarakat sudah memiliki kapasitas yang mumpuni.

Keempat, aspek keberlanjutan pasca-kegiatan pengabdian merupakan batasan signifikan. Setelah tim pengabdian menarik diri, keberlanjutan Pokja Pengawasan sangat bergantung pada motivasi internal anggota, dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa atau BPD, serta adanya mekanisme kelembagaan yang kuat di tingkat desa. Tanpa adanya kerangka kelembagaan yang jelas (misalnya, melalui peraturan desa tentang pengawasan partisipatif) dan pendanaan yang mandiri, semangat pengawasan yang telah dibangun bisa saja meredup seiring waktu.

Berdasarkan kelemahan dan batasan di atas, beberapa agenda perbaikan dapat dirumuskan untuk kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang:

Pertama, Perpanjangan Durasi dan Intensitas Pendampingan: Kegiatan selanjutnya perlu dirancang dengan durasi yang lebih panjang atau dengan model pendampingan berkelanjutan yang fleksibel, misalnya melalui kunjungan periodik pasca-pelatihan inti. Ini memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih mendalam dan pemantauan implementasi di lapangan yang lebih konsisten. Kedua, Modul Pelatihan Berjenjang dan Berbasis Kebutuhan: Materi pelatihan dapat dikembangkan menjadi modul berjenjang, mengakomodasi tingkat pemahaman yang berbeda. Fokus pada studi kasus nyata dari Desa Sumberlele akan membuat materi lebih relevan. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menyediakan pelatihan refresher atau workshop khusus untuk materi-materi teknis yang lebih kompleks.

Ketiga, Penguatan Advokasi Transparansi Informasi: Kegiatan selanjutnya harus lebih proaktif dalam mengadvokasi pemerintah desa untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan terkait semua proyek pembangunan. Ini bisa dilakukan dengan membantu desa menyusun papan informasi proyek yang detail, membuat website atau media sosial desa yang memuat data anggaran dan pelaksanaan, atau memfasilitasi pertemuan terbuka rutin antara pemerintah desa dan masyarakat. Kelima, Pembentukan Mekanisme Kelembagaan Pengawasan

yang Permanen: Upaya harus difokuskan pada membantu desa menyusun peraturan desa (Perdes) atau standar operasional prosedur (SOP) yang melembagakan peran Pokja Pengawasan. Ini akan memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi aktivitas mereka, serta mengintegrasikannya ke dalam sistem tata kelola desa. Terakhir, pencarian Sumber Daya Berkelanjutan: Mendorong Pokja Pengawasan atau pemerintah desa untuk mencari sumber pendanaan mandiri (misalnya, dari dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan, atau kemitraan dengan pihak lain) untuk kegiatan operasional pengawasan mereka.

Dengan demikian merumuskan agenda perbaikan yang terencana, kegiatan pengabdian masyarakat di masa depan dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi terwujudnya pembangunan fisik yang berkualitas dan akuntabel di Desa Sumberlele. Ini bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dan segenap jajarannya yang mengizinkan kegiatan sekaligus sebagai implementasi kegiatan kerjasama dengan Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Universitas Tamansiswa Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS Surabaya, Politeknik Negeri Madura, Universitas Ronggolawe, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan Universitas Negeri Lampung.

Referensi

- Intelman M, Idayati F. Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu dan Riset ... [Internet]. 2024;13(8). Tersedia pada: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6049>
- Nugraha MF. Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama (di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang) [Internet] [skripsi]. UNIVERSITAS AIRLANGGA; 2015 [dikutip 28 Januari 2022]. Tersedia pada: <http://www.lib.unair.ac.id>
- Muliani B, Tukiman T. Evaluasi Kualitas Layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung: Sebuah Pendekatan Kuantitatif. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2024;6(1):1–17.
- Ginting G, Kuswandi A, Budiati A. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 14 Desember 2024;6(1):112–29.
- Septiandika V, Supriyanto S, Maksin M, Oktarina RA, Wulandari N. Kajian Kuantitatif Hubungan Kompetensi Aparatur dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2 Juni 2025;6(2):165–80.

- Apriyanti S. DAMPAK PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA MANUNGGAJAYA KECAMATAN Jurnal Ilmu Pemerintahan [Internet]. 2020;8(2). Tersedia pada: [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/Jurnal%20Sofiya%20Apriyanti%20\(12-08-20-09-18-07\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/Jurnal%20Sofiya%20Apriyanti%20(12-08-20-09-18-07).pdf)
- Rahum A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser [Internet]. Ejournal Ilmu pemerintahan. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id; 2015. Tersedia pada: [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20\(11-05-15-10-50-31\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20(11-05-15-10-50-31).pdf)
- Hasan S, Kasim N, Tijow L. PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT. Borneo Law Review Journal [Internet]. 2020;(Query date: 2021-06-07 08:49:43). Tersedia pada: <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/1713>
- Lonteng T, Sumampow I, Kumayas N. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Governance [Internet]. 2022;(Query date: 2025-05-09 10:45:28). Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37901>
- Rahayu S, Diatmika I. Pengawasan Pemerintah dalam Memperkuat Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. Indonesian Journal ... [Internet]. 2020;(Query date: 2021-06-05 15:43:49). Tersedia pada: <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/578>
- Amin F. Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDDES. Deepublish; 2023. 150 hlm.
- Amin F. Penganggaran di Pemerintah Daerah. Universitas Brawijaya Press; 2019. 208 hlm.
- Jamasy O, Pranoto Y, Muhlasin, Yasin AP. KONSEP DAN MODEL PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN UNTUK ORGANISASI BERBASIS MASYARAKAT. Pt Kimhsafi Alung Cipta; 2025. 311 hlm.
- Geeraert A, Eekeren F van. Good Governance in Sport: Critical Reflections. Taylor & Francis; 2021. 331 hlm.
- Mungiu-Pippidi A, Johnston M. Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Circles of Anti-corruption. Edward Elgar Publishing; 2017. 321 hlm.
- Sarosa W, Simanjuntak H, Hamdri L. Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 325 hlm.
- Nurhayati N, Lutfi MY, Pujiriyani DW, Rosidah, Estede S, Muta'ali L, dkk. EKONOMI DESA: Strategi Pemberdayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia; 2025. 170 hlm.

